

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Hidup sehat adalah bebas dari derita penyakit dan jauh dari ancaman kematian, merupakan idaman dan harapan manusia (Ngatimin, 2005).

Tantangan pembangunan kesehatan menuntut adanya dukungan sumber daya yang cukup serta arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat, namun seringkali para pemebentukan kebijakan dibidang kesehatan mengalami kesulitan dalam hal pengambilan keputusan yang tepat karena keterbatasan atau ketidak tersediaannya data informasi yang akurat, tepat dan cepat. Data dan informisi merupakan sumber daya yang sangat strategis dalam pengelolaan pembangunan kesehatan yaitu pada proses manajemen, pengambilan keputusan, pemerintahan, dan penerapan akuntabilitas (Depkes 2012).

Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat kesehatan, maka semua Negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik- baiknya. Pelayanan kesehatan ini

berarti setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok ataupun masyarakat (Adisasmito, 2010).

System kesehatan merupakan wujud sekaligus metode penyelenggara pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langka guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan. Indikator pencapaian system kesehatan menunjuk pada tingkat kesehatan yang berhasil dicapai dan ketanggapan system tersebut. Indikator ini terutama dipengaruhi oleh upaya kesehatan yang diselenggarakan disuatu Negara (Adisasmito 2007).

Penyelenggaraan pembangunan system kesehatan tersebut dituangkan dalam berbagai program kesehatan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pertanggung jawaban secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk menunjang hal tersebut maka mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan. System pelayanan kesehatan tersebut memerlukan system informasi yang saling mendukung dan terkait sehingga setiap kegiatan dan program kesehatan yang dilaksanakan dan dihasilkan untuk kepentingan masyarakat dapat diketahui, dipahami, diantisipasi dan dikelola sebaik baiknya.

Untuk penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan strategi yang ditetapkan, dibutuhkan kebijakan dan manajemen sumber daya yang efektif dan efisiensi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan sehingga dapat tercapai pelayanan kesehatan dengan merata dan berkualitas. Sasaran yang akan dicapai, salah satunya adalah tersedianya informasi kesehatan yang akurat, merupakan informasi tersebut bebas dari kesalahan, tepat waktu maksudnya yaitu informasi harus diberikan pada waktu yang tepat, dan lengkap sebagai bahan dalam proses pengambilan keputusan, dalam pengelolaan pembangunan kesehatan, serta penyediaan informasi, untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan disemua tingkat administrasi (Rachmat 2004).

Sistem informasi merupakan system sosial yang menjadi bagian dari system kesehatan bahkan system pemerintahan secara keseluruhan. Data dan informasi merupakan sumber daya yang strategis bagi pimpinan dan organisasi dalam pelaksanaan manajemen, oleh karena itu penyediaan data dan informasi yang berkualitas sangat dibutuhkan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan.

Seiring dengan data dan informasi di tingkat puskesmas, Departemen kesehatan RI telah melakukan kebijakan melalui Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dimana sumber utamanya adalah SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu

Puskesmas), Namun dalam pelaksanaannya menurut kajian Depkes RI, dan data SP2TP dimaksudkan belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh karenaberbagai hal yang berkaitan dengan rancangan system tersebut.

Kemenkes No. 844 tahun 2006 menyatakan bahwa pemerintahan baru memiliki kebijakan mengenai standar informasi kesehatan hanya dari segi kode data bidang kesehatan. Belum ada yang mengatur pertukaran data kesehatan secara elektronik, pada hal saat ini perkembangan teknologi begitu pesat dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan informasi layanan kesehatan sangat besar.

Peraturan Kepmenkes No 837 tahun 2007 tentang pengembangan jaringan computer *Online* sitem informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS online) menyatakan bahwa target penyelenggaranya 100% jaringan komunikasi data online terintegrasi antara seluruh dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan provinsi, Rumah sakit pusat, UPT Pusat dengan Kementerian Kesehatan belum seluruhnya tercapai.

Peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang diberikan puskesmas sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan kualitas informasi yang lengkap dan dan akurat dituntut untuk bekerja secara professional guna mendukung visi Indonesia sehat 2005. Indonesia akan sehat tercapai dengan baik apabila didukung oleh

tersedianya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola informasi pelayanan pasien serta semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh puskesmas. Informasi yang dihasilkan diharapkan berkualitas dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Kualitas system informasi yang dihasilkan Simpus seharusnya memiliki relevansi dengan informasi yang dihasilkan terdahulu atau dengan kejadian yang sedang diteliti langsung (Sabarguna 2008). Gordon B, Dafis menambahkan kualitas informasi ditentukan berdasarkan ketepatan waktu dalam memberikan informasi (*Timeliness*), Serta Ketelitian (*Accuraci*).

Puskesmas merupakan salah satu Institusi pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat disuatu wilayah tertentu. Lingkup pelayanan begitu luas, tentunya berpotensi menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga keberadaan system informasi diperlukan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, menyimpan dan memanfaatkan data untuk menyelesaikan masalah- masalah kesehatan masyarakat.

Hal ini juga diperkuat Budharti, dkk dalam studi kasusnya di Denpasar dan Kupang yang menyatakan bahwa perlu peninjauan kembali pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan tingkat Kabupaten/ Kota yang berjalan kurang lancar yang terjadi pada saat informasi sangat diperlukan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan dan advokasi. Hasil pelaksanaan SIKNAS tersebut antara lain

data kurang akurat, kurang sesuai dengan kebutuhan, pengiriman dari puskesmas atau rumah sakit tidak tepat waktu serta data yang dikumpulkan masih banyak sehingga memberikan beban bagi para petugas.

Penelitian yang dilakukan oleh Yadnyana (2008) menunjukkan bahwa faktor faktor yang membentuk kemampuan manajemen secara bersama bersama berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap kualitas informasi akuntansi. Besarnya pengaruh faktor yang membentuk kemampuan manajemen terhadap kualitas informasi akuntansi sebesar 68,3%. Ini berarti bahwa kualitas informasi akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan manajemen, tetapi dipengaruhi juga oleh variabel- variabel lainnya sebesar 21,7% yang tidak termasuk dalam model.

Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan sebagaimana terkandung dalam undang-undang kesehatan No.36 tahun 2009. Struktur pencatatan dan pelaporan merupakan aspek yang menonjol dalam informasi kesehatan karena perwujudannya sangat nampak dalam kegiatan sehari-hari. Sejumlah permasalahan dengan berbagai tingkat ketelitian atau kerumitannya dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari para petugas. Aliran penyampaian rekapitulasi dan analisisnya mengisi kesibukan petugas, (Kushadiwijaya, 2000).

Dengan dikembangkan system informasi kesehatan puskesmas yang dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat dan dapat dipercaya sehingga informasi yang disajikan puskesmas dapat dipakai untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkat system kesehatan dan berbagai jenis manajemen kesehatan baik untuk manajemen pasien, unit dan system kesehatan kepada masyarakat. Hal ini akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja di puskesmas.

Permasalahan ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Sukmawati pada tahun 2008 menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan setiap proses dalam domain pengadaan dan organisasi pada pengembangan dan penerapan SIRS di RSUD Salewangang, belum memenuhi standar COBIT (*Control Objective for information and related Technology*). Hal ini ditandai oleh rencanastrategic pengembangan SIRS belum ada, penentuan arsitektur informasi dan arah teknologi lebih banyak dilakukan oleh *vendor*, struktur organisasi atau tim pengelolaan SIRS termasuk *steering committee*, belum dibentuk.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 12 November 2016 dengan pihak pegawai Puskesmas mengatakan bahwa pengiriman laporan mingguan (W2) tidak pernah tepat waktu, kelengkapan dalam pengisian form w2 yang disediakan tidak maksimal dan belum sesuai dengan format yang disediakan, dan mereka tidak pernah memberikan informasi kepada dinas kesehatan bahwa laporan mingguan (W2) terlambat. Proses pengimputan data dilakukan secara

manual sehingga sering terlambat dilakukan pengumpulan laporan. Permasalahan lain yakni adanya beban ganda pengelolaan SIK di Puskesmas Salo mengakibatkan penyajian informasi dalam bentuk profil puskesmas selalu terlambat serta informasi antar unit belum seragam karena setiap unit mempunyai format pelaporan yang berbeda atau sendiri sendiri. Di Dinas kesehatan kota pinrang, SP2TP dilaksanakan dengan mempedomani SK Dirjen Binkesmas No.590/BM/DJ/info/V/96. Menurut data tahunan 2014 hanya 55,51% puskesmas mengirim laporan tepat waktu; 51,3% data tidak tersedia lengkap yang keakurasinya masih diragukan.

Pengelolaan data secara manual, mempunyai banyak kelemahan, selain membutuhkan waktu yang lama, keakuratannya juga kurang dapat diterima, karena kemungkinan kesalahan sangat besar. Dengan dukungan teknologi informasi yang ada sekarang ini, pekerjaan pengolahan data dengan caramanual dapat digantikan dengan suatu system informasi komputer (Lidya Andriani, 2009). Sistem informasi dapat digunakan sebagai sarana strategis untuk memberikan pelayanan yang menekankan pada kepuasan pasien, Handoyo (2008).

Dari hal diatas, penelitian ingin mengetahui bagaimana mengetahui pengaruh kualitas system informasi Kesehatan (SIK) berpengaruh terhadap penerapan manajemen Puskesmas di wilayah kerja puskesmas.



## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi bila ditinjau dari aspek ketersediaan (*availability*) terhadap penerapan manajemen di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi bila ditinjau dari aspek tepat waktu (*timelines*) terhadap penerapan manajemen di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi bila ditinjau dari aspek relevan (*relevance*) terhadap penerapan manajemen di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang ?
4. Bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi bila ditinjau dari aspek akurat (*accurate*) terhadap penerapan manajemen di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang ?
5. Bagaimana pengaruh kualitas sistem informasi bila ditinjau dari aspek dapat dipercaya (*reliable*) terhadap penerapan manajemen di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang ?
6. Variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap penerapan manajemen di Puskesmas Salo Kab Pinrang

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan umum

Untuk menganalisis pengaruh kualitas system informasi kesehatan terhadap penerapan manajemen diwilayah kerja Puskesmas Salo Kab Pinrang.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas sistem informasi bila ditinjau dari aspek ketersediaan (*availability*) terhadap penerapan manajemen di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang Tahun 2017
- b. Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas sistem informasi bila ditinjau dari aspek tepat waktu (*timelines*) terhadap penerapan manajemen di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang Tahun 2017
- c. Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas sistem informasi bila ditinjau dari aspek relevan (*relevance*) terhadap penerapan manajemen di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang Tahun 2017
- d. Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas sistem informasi bila ditinjau dari aspek akurat (*accurate*) terhadap penerapan manajemen di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang Tahun 2017
- e. Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas sistem informasi bila ditinjau dari aspek dapat dipercaya (*reliable*) terhadap penerapan manajemen di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang Tahun 2017
- f. Untuk mengetahui variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap penerapan manajemen di Puskesmas Salo Kabupaten Pinrang tahun 2017

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai sumber informasi tentang gambaran kualitas informasi kesehatan terhadap dalam penerapan manajemen puskesmas.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak puskesmas dalam rangka menganalisis kualitas informasi kesehatan terhadap dalam penerapan manajemen puskesmas.
3. Sebagai tambahan pengalaman, wawasan, pengetahuan penulisan dalam melakukan penelitian tentang kualitas system informasi kesehatan